

PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PADA SENTRA UKM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (KARET ALAM)

Widiya Avianti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Indonesia

widiya.stiewibawakartaraharja@gmail.com

ABSTRAK

Dibutuhkannya Pengembangan Factory Sharing (Rumah Produksi Bersama) untuk pengolahan karet terpadu yang dikelola oleh Koperasi diharapkan dapat Menjamin kontonuitas permintaan karet yang bermutu baik melalui rantai pasok yang efektif dan efisien, Meningkatkan kuantitas dan mutu produksi, Memperoleh rekomendasi kebijakan pengembangan Rumah Produksi Bersama KUKM komoditas Karet di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka pencapaian target SDGs tersebut, Rumah Produksi Bersama (RPB) Karet Alam di Kalimantan Selatan dapat memberikan kontribusi besar, melalui efisiensi dan efektivitas operasi yang optimal. Selain itu juga mempertimbangkan Pendekatan green industry clustering (green economy, green technology, & green product), dengan rantai pasok yang integratif dari hulu-hilir dengan prioritas pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan usaha melalui Rumah Produksi Bersama komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut layak secara finansial, dan penggantian bahan bakar dari solar menjadi cangkang sawit/biomass dapat meningkatkan keuntungan RPB.

Kata Kunci: Rumah Produksi Bersam; RPB; UKM; koperasi; karet alam

PENDAHULUAN

Karet alam di Indonesia sebagian besar diekspor dengan negara pengimpor terbesar pada tahun 2020 adalah Amerika Serikat, Jepang, China, India, dan Korea. Perkebunan di Kalimantan Selatan memiliki luas lahan dengan komposisi sebagai berikut.

- a. Luas lahan: 269.981 ha
 1. Kab. Tanah Laut : 21.584 ha
 2. Kec. Batu Ampar : 4.074 ha
 3. Kec. Jorong : 2.765 ha
- b. Komposisi
 1. 89,90% Produksi Kebun Rakyat
 2. 4,97% PBN
 3. 5,13% PBS

Permasalahan Produktivitas kebun rakyat yang jauh lebih rendah dibanding PTP/PNP dan PBS (650 kg KK/ha/tahun serta mutu produk masih rendah dan belum terstandarisasi sehingga produk yang dihasilkan masih dalam bentuk *crumb rubber* (CR) dan *ribbed smoked sheet* (RSS), diketahui jumlah pabrik pengolahan masih sedikit (sembilan pabrik di Provinsi Kalimantan Selatan) menjadi tantangan bagi Sentra UKM di Provinsi Kalimantan Selatan. Dibutuhkannya Pengembangan *Factory Sharing* (Rumah Produksi Bersama) untuk pengolahan karet terpadu yang dikelola oleh Koperasi diharapkan dapat: (1) menjamin kontonuitas permintaan karet yang bermutu baik melalui rantai pasok yang efektif dan efisien; (2) meningkatkan kuantitas dan mutu produksi; dan (3) memperoleh rekomendasi kebijakan pengembangan Rumah Produksi

Bersama KUKM komoditas Karet di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Pada dasarnya hal ini sudah dituangkan di dalam kesepakatan global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari kompleksitas SDGs tersebut, maka terdapat 17 tujuan yang harus dicapai setiap negara, termasuk konstituen di dalamnya, yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Kompleksitas *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat diatasi mellaui studi kelayakan pada sentra UKM di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang fokus pada komoditas karet alam. Tim pengabdian menawarkan solusi melalui kegiatan studi kelayakan tersebut.

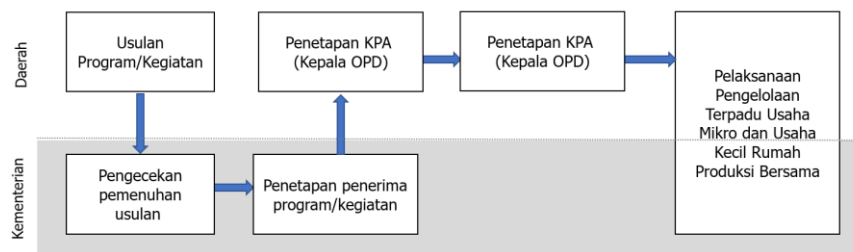
METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini mencakup empat tahap, yaitu studi pendahuluan, pengumpulan data, analisis data, dan finalisasi kelayakan. Berikut ini disajikan secara terinci metode pelaksanaan pengabdian ini.



Gambar 1. Metodologi Studi

Berikut merupakan tahapan proses program/kegiatan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama serta, uraian tugas pihak yang terlibat dalam program/kegiatan Tugas Pembantuan ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam tugas pembantuan ini adalah menteri, gubernur dan/atau wali kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD).



Gambar 2. Proses Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil berupa Rumah Produksi Bersama

Dalam rangka pencapaian target target SDGs tersebut, Rumah Produksi Bersama (RPB) Karet Alam di Kalimantan Selatan dapat memberikan kontribusi besar, melalui efisiensi dan efektivitas operasi yang optimal. Selain itu juga mempertimbangkan Pendekatan *green industry clustering (green economy, green technology, & green product)*, dengan rantai pasok yang integratif dari hulu-hilir dengan prioritas pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan meningkatkan *value added* yang dapat dirasakan di dalam negeri. Secara utuh RPB tersebut diarahkan untuk dapat beroperasi dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Karena dapat dikatakan bahwa upaya RPB Karet Alam Kalimantan Selatan ini akan mendukung SDGs pada tujuan berikut.

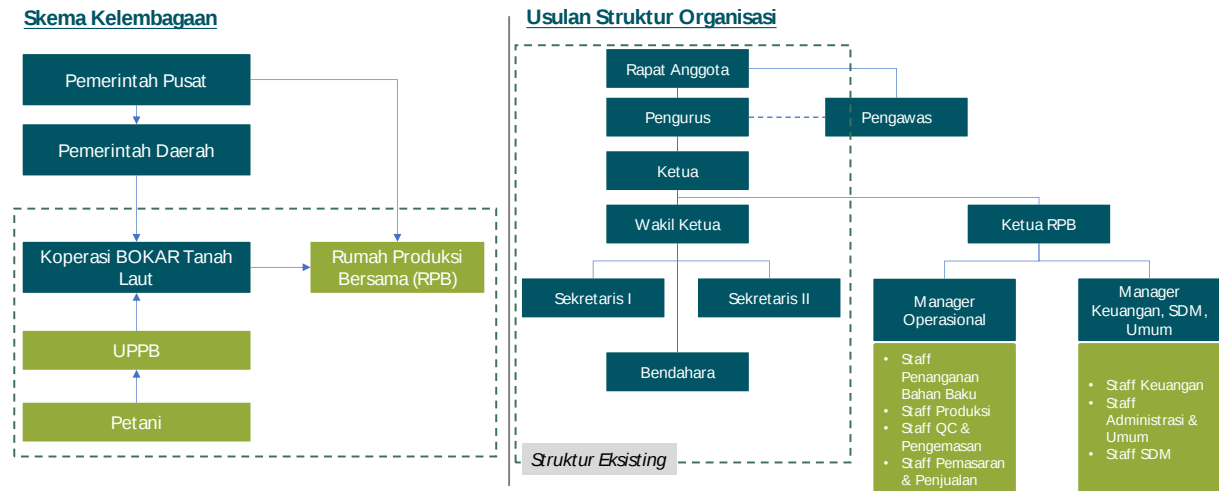
Tabel 1. Dukungan RPB Karet Alam terhadap Tujuan SDGs

Terkait Tujuan SDGs PROSES	Terkait Tujuan SDGs OUTCOME	Terkait Tujuan SDGs BENEFIT/IMPACT
9- Industri, inovasi, dan infrastruktur 12-Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 13-Penanganan perubahan iklim 15-Ekosistem daratan 17-Kemitraan untuk mencapai tujuan	8-Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	1-Tanpa kemiskinan 2-Tanpa kelaparan 3-Kehidupan sehat dan sejahtera 10-Berkurangnya kesenjangan 13-Penanganan perubahan iklim 15-Ekosistem daratan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan

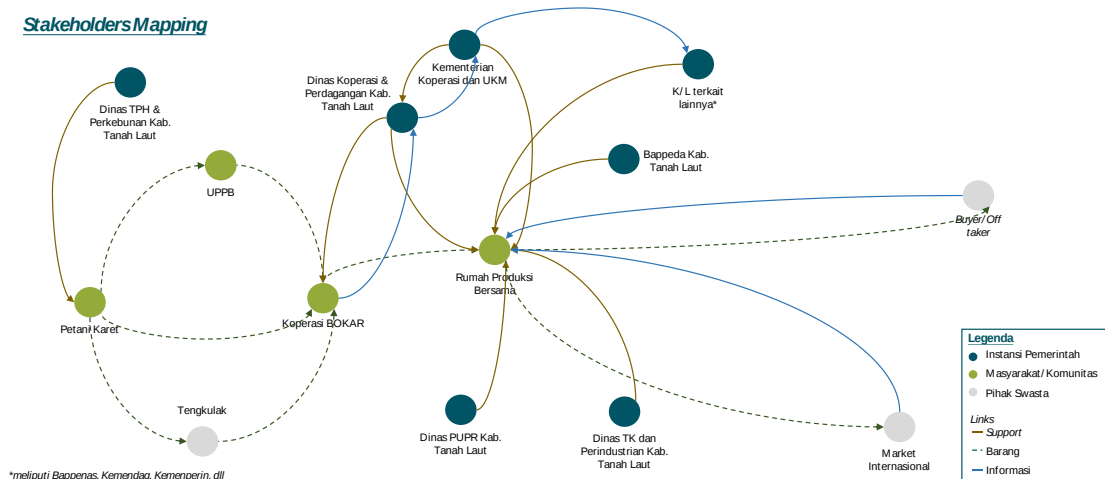
Secara umum, pada model kelembagaan ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mengembangkan Rumah Produksi Bersama melalui koperasi (c.q. Koperasi Bokar Tanah Laut). Namun, dibutuhkan penambahan fungsi organisasi terkait dengan pengelolaan bisnis secara profesional. Berikut ini disajikan skema kelembagaan.



Gambar 3 .Skema Kelembagaan

STAKEHOLDERS

Meskipun pengelolaan RPB diserahkan kepada Koperasi BOKAR, peran *stakeholders* lain pada ekosistem bisnis *crumb rubber* sangat penting. Berikut I I disajikan *stakeholders mapping*.



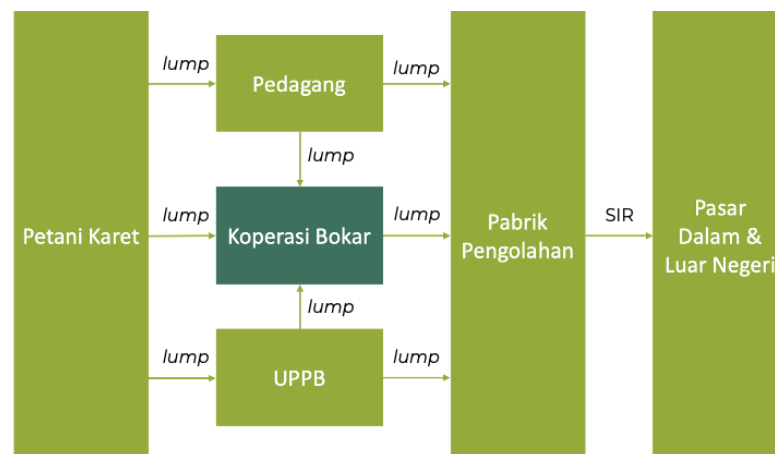
Gambar 4 .Stakeholders Mapping

Stakeholders pada kegiatan pengembangan Rumah Produksi Bersama ini terdiri dari tiga kategori, yaitu instansi pemerintah, masyarakat/komunitas masyarakat serta pihak swasta. Instansi Pemerintah terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Pusat, terdiri dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian/Lembaga lain yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.
- 2) Pemerintah Daerah meliputi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tanah Laut.

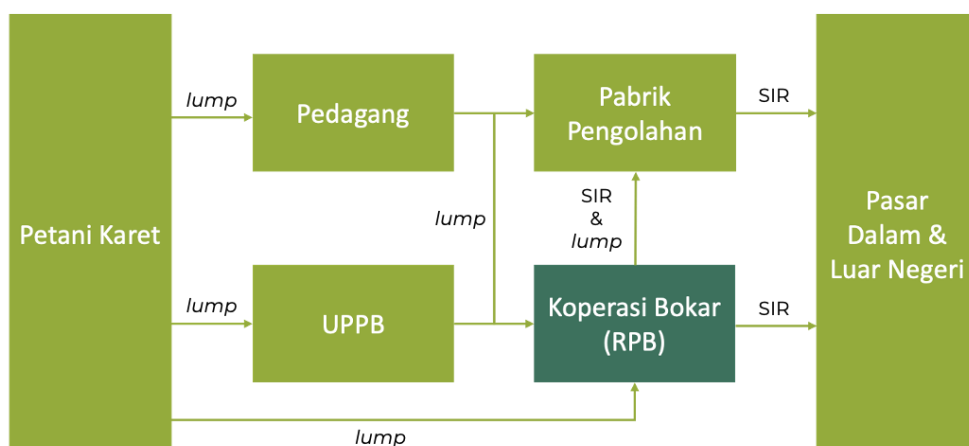
SUPPLY CHAIN (Rantai Nilai)

Keberadaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dan koperasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan harga jual karet. Saat ini Koperasi Bokar Tanah Laut menjual langsung *lump* yang didapatkan ke beberapa pabrik pengolahan SIR 20.



Gambar 5 .Rantai Pasok Saat Ini

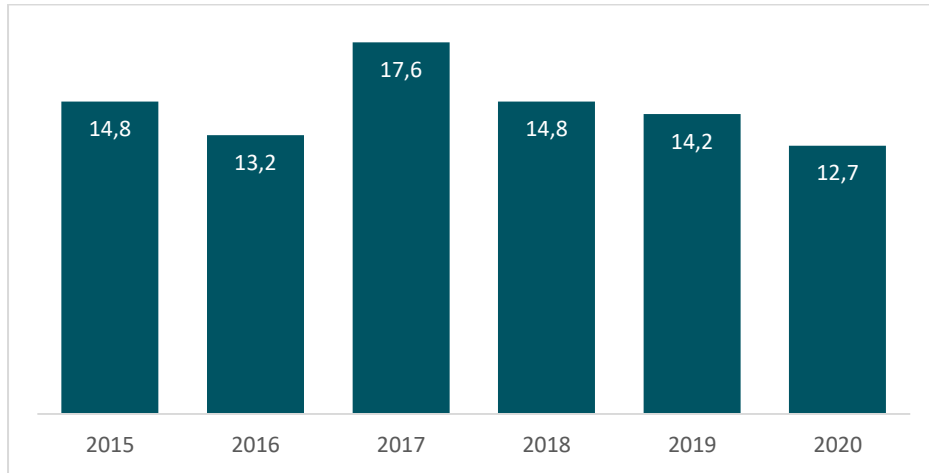
Adanya Rumah Produksi Bersama dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan serta meningkatkan kesejahteraan petani . Keberadaan RPB di Tanah Laut juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Tanah Laut.



Gambar 6. Rantai Pasok dengan Rumah Produksi Bersama

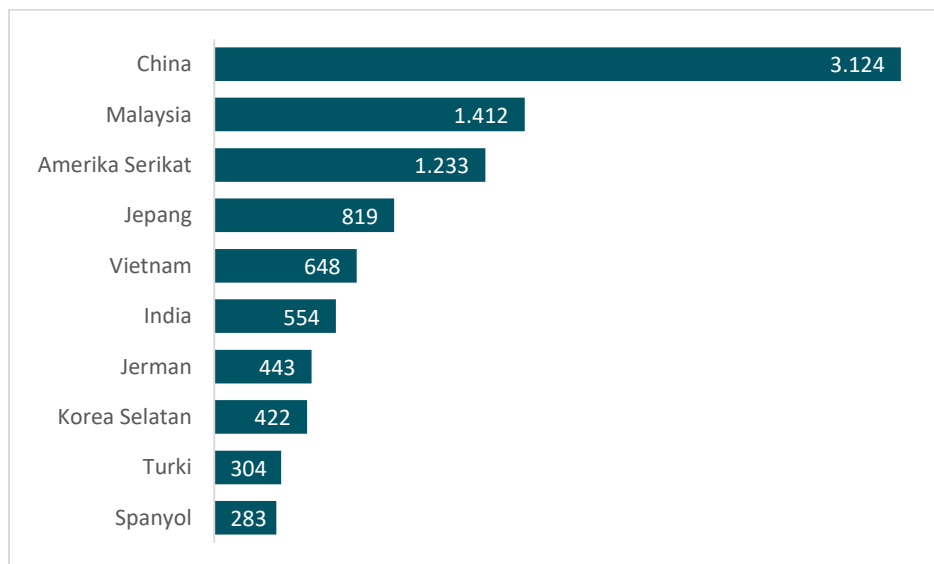
PASAR

Berdasarkan data dari The Observatory of Economic Complexity (OEC), nilai impor karet alam dunia pada 2020 mencapai 12,7 miliar dolar AS. Akan tetapi, nilai impor karet alam dunia menunjukkan tren menurun sejak 2017 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



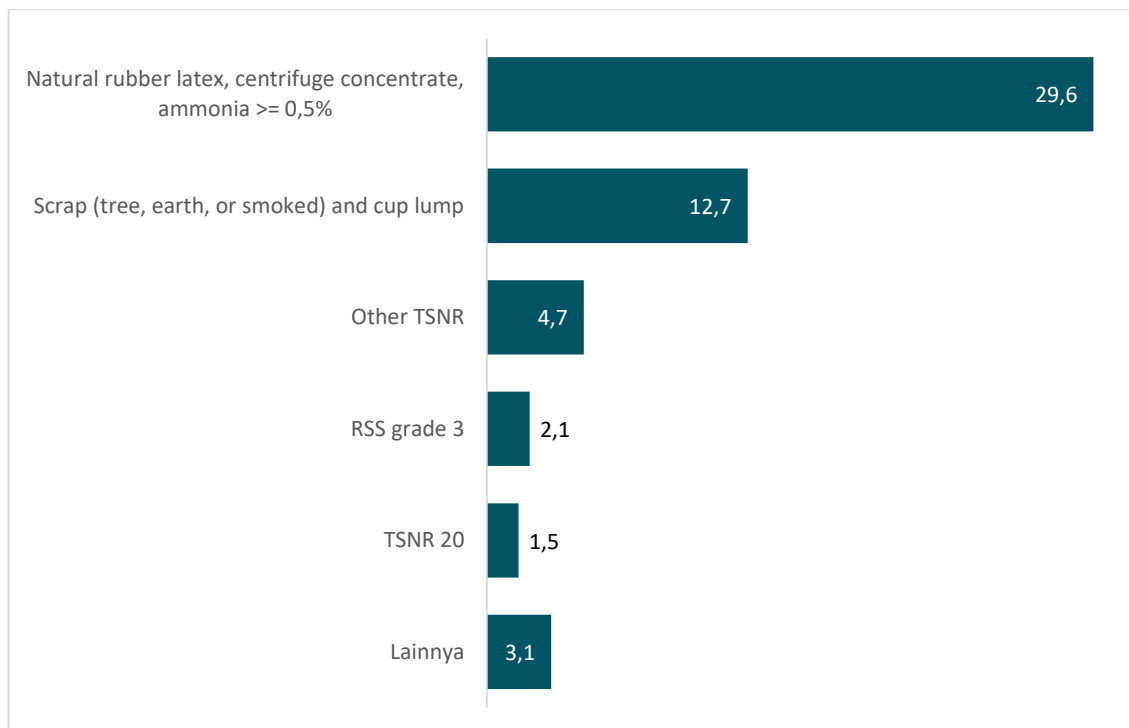
Gambar 7 .Nilai Impor Karet Alam Dunia 2015-2020 (Miliar Dolar AS)
(Sumber: *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*)

Hal ini perlu menjadi perhatian untuk fokus pada produk dengan permintaan dan nilai yang tinggi di saat terjadi penurunan nilai perdagangan keseluruhan. Bagi Indonesia yang nilai ekspornya juga menurun, terdapat beberapa *market* potensial yang dapat dimaksimalkan. China, Malaysia, dan Vietnam dapat menjadi pasar potensial untuk ekspor karet alam Indonesia



Gambar 8 .Nilai Impor Karet Alam 10 Negara Tertinggi pada 2020 (Juta Dolar AS)
(Sumber: *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*)

Berikut juga disajikan nilai impor karet alam Indonesia berdasarkan kode hs pada 2020.



Gambar 9. Nilai Impor Karet Alam Indonesia Berdasarkan Kode HS pada 2020 (Juta Dolar AS)
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Untuk pasar dalam negeri, tampaknya kebutuhan akan lateks dan lump justru belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri sehingga masih harus impor. Beberapa penyebabnya adalah rendahnya produktivitas serta petani yang tidak biasa menghasilkan lateks. Nilai impor lateks (centrifuge concentrate, ammonia p 0,5%) dan lump mencapai 29,6 dan 12,7 juta dolar AS pada 2020 seperti yang ditunjukkan pada Gambar diatas. Hal ini juga dapat menjadi peluang bagi Rumah Produksi Bersama untuk memasarkan lump ke pasar dalam negeri, sebagai tambahan dari ekspor SIR. Akan tetapi, perlu dilakukan peningkatan produktivitas di tingkat petani. Dengan begitu, harapannya RPB dapat menjangkau pasar internasional dan juga pasar dalam negeri.

Pada tahap awal operasionalisasi RPB, koperasi dapat menjual SIR 20 yang dihasilkan ke offtaker mereka saat ini, khususnya PT Nusantara Batulicin dan PT New Kalbar Processors. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan terlebih dahulu produk yang dihasilkan oleh RPB dan koperasi dapat mengurus sertifikasi untuk produk yang dihasilkan RPB untuk dapat diekspor sendiri.

Aspek Produksi

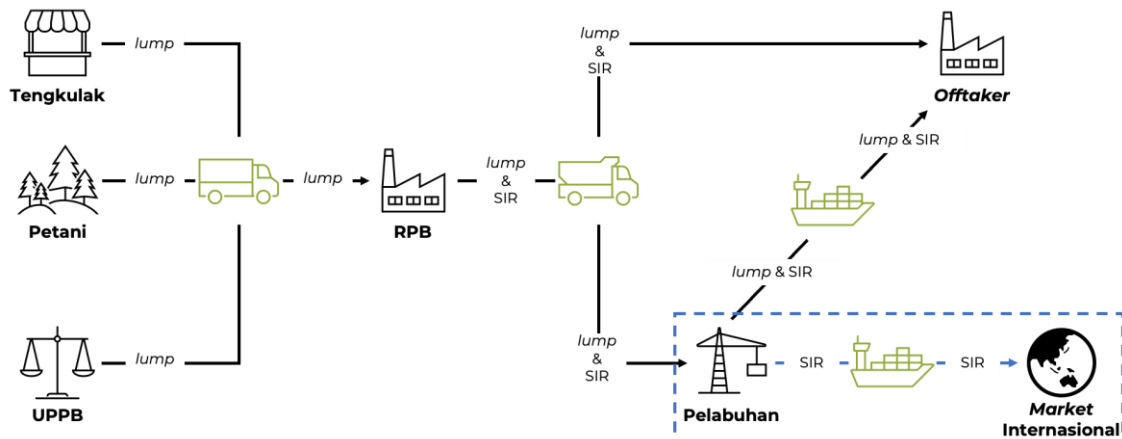
Beberapa produk yang bisa dihasilkan Rumah Produksi Bersama. Produk tersebut di antaranya adalah lump, crumb rubber, ribbed smoked sheet (RSS), dan lateks pekat. Saat ini, pihak Koperasi Bokar Tanah Laut sudah melakukan jual beli lump, sehingga masih perlu mempelajari produk crumb rubber, RSS, dan lateks pekat. Berikut ini disajikan tabel perbandingan produk karet dari aspek bahan baku, pengolahan, dan harga.

Tabel 2. Perbandingan Produk Karet

Aspek	Crumb Rubber	RSS	Lateks Pekat	Keterangan
Bahan Baku	<i>Lump</i>	Lateks	Lateks	Para petani di Tanah Laut belum terbiasa menghasilkan lateks. Saat ini mereka memproduksi <i>lump</i> .
Pengolahan	- Sortasi - Breaker - Pencucian <i>Hammer Mill</i> - Pencucian <i>Creepers</i> - Pemeraman <i>Shredder</i> - Pencucian <i>Dryer</i> - Pengepresan - Pengemasan <i>Paletting</i>	- Penyaringan - Pengenceran - Koagulasi - Penggilingan - Pencucian - Penirisan - Pengasapan - Sortasi - Pengepresan - Pelaburan	- Penyaringan - Pendadihan - Pemeraman - Sentrifugasi - Penyimpanan	<i>Crumb rubber</i> membutuhkan proses pengolahan yang lebih panjang dibandingkan dengan RSS dan lateks pekat.
Harga	135 US Cents/Kg (SICOM STR20)	165 US Cents/Kg (SICOM RSS3)	103 US Cents/Kg (Malaysia <i>Latex</i> 60%)	Per 30 September 2022

Proses Distribusi

Rumah Produksi Bersama bisa mendapatkan pasokan *lump* dari petani, UPPB, maupun tengkulak. Gambaran saluran distribusi RPB dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 10. Saluran Distribusi Rumah Produksi Bersama

Para pemasok *lump* ini dapat langsung mengirimkan *lump* ke RPB atau pihak RPB yang berkeliling untuk membeli *lump* sebagai bahan baku pembuatan *crumb rubber*. Pada tahap awal operasionalisasi, RPB dapat menjual *lump* dan *crumb rubber* ke *existing offtaker* dari koperasi, seperti PT Nusantara Batulicin dan PT New Kalbar Processors. Distribusi ke para *offtaker* dapat dilakukan melalui jalur darat dengan truk serta jalur laut dengan kapal.

Setelah konsisten memproduksi *crumb rubber* untuk perusahaan lain, RPB dapat melakukan persiapan untuk memperoleh sertifikasi SNI sendiri untuk *crumb rubber* yang dihasilkan. Selain itu, perlu melakukan persiapan untuk memperoleh izin ekspor. Dengan begitu, selain dapat memasarkan *crumb rubber* ke pasar dalam negeri, RPB juga dapat mengekspor sendiri *crumb rubber* ke luar negeri. Distribusi *crumb rubber* ke luar negeri tersebut dapat menggunakan kapal dari pelabuhan di Banjarmasin.

SIMPULAN

Berdasarkan studi kelayakan sentra UKM karet alam Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pengembangan usaha melalui Rumah Produksi Bersama komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut layak secara finansial. Akan tetapi, penggantian bahan bakar dari solar menjadi cangkang sawit/biomass dapat meningkatkan keuntungan RPB. Indikator kelayakan untuk Rumah Produksi Bersama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Indikator Kelayakan Rumah Produksi Bersama

Indikator	Solar	Cangkang Sawit/Biomass
NPV	Rp 31.221.708.658	Rp 68.713.088.871
IRR	24,9%	43,3%
BCR	1,05	1,11
<i>Payback Period</i>	4 Tahun	3 Tahun

Rekomendasi yang diajukan sebagai berikut.

- 1) Dari sisi pasokan, harus diperhatikan harga beli dan kepastian volume serta kualitas pasokan *lump* dari petani karet. Selain itu, perlu dipastikan pasokan air mengingat lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada jauh dari sungai. Yang terakhir, perlu juga diperhatikan pasokan cangkang sawit dan/atau kayu bakar sebagai alternatif bahan bakar untuk kelancaran produksi.
- 2) Dari sisi produksi, harus diperhatikan keahlian tenaga kerja, kontinuitas *shift* serta keamanan proses produksi (K3L) melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 3) Dari sisi pasar, fluktuasi harga jual SIR harus selalu diawasi (*monitoring*). Peningkatan aksesibilitas ke *buyer* serta kepastian volume permintaan per bulan juga menjadi faktor yang harus selalu dianalisis oleh bagian operasional.
- 4) Kepastian penyediaan jalan akses dan utilitas umum serta pembiayaan dan pemodalan harus dikonfirmasi sebelum pelaksanaan pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT , atas Izin-Nya Penulis dapat melaksanakan Penyusunan Studi Kelayakan Pada Sentra Ukm Karet Alam Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berikut ini. (1) Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, (2) Sentra UKM Karet Alam Provinsi Kalimantan Selatan, (3) PT. Dua Ribu Satu Pangripta selaku Konsultan Manajemen, dan (4) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga hasil studi kelayakan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (t.thn.). *Profil Kabupaten Tanah Laut*. Diambil kembali dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan: <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/>
- BPPD Kabupaten Tanah Laut. (2021). *Kajian Kawasan Berpotensi Bencana dan Mitigasinya di Kabupaten Tanah Laut*. Tanah Laut: BPPD Kabupaten Tanah Laut.
- BPS. (2021). *Statistik Karet Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- BPS Kabupaten Tanah Laut. (2022). *Kabupaten Tanah Laut dalam Angka*. Tanah Laut: BPS Kabupaten Tanah Laut.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (2016). *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036*. Tanah Laut: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023*. Tanah Laut: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (2020, Oktober 23). *Persatuan Kelompok Petani Karet Akan Lebih Menguntungkan*. Diambil kembali dari Portal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut: <https://portal.tanahlautkab.go.id/persatuan-kelompok-petani-karet-akan-lebih-menguntungkan>
- Wibowo, H. (2014). *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tanah Laut Tahun 2014-2023 Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan*. Pelaihari: Kesatuan Pengelolaan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.